

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 LATAR BELAKANG

Saat ini pemerintahan di Indonesia baru saja menerapkan penggunaan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, yang digunakan sebagai alat untuk pertanggungjawaban kepada seluruh masyarakat Indonesia. Penerapan penggunaan laporan keuangan tersebut tidak hanya dilaksanakan di tingkat pemerintah pusat, akan tetapi penerapannya juga dilakukan hingga tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Penggunaan laporan keuangan sebagai alat untuk pertanggungjawaban merupakan upaya konkret di dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang berkaitan sangat erat karena dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan menghendaki adanya suatu keterbukaan di dalam penyusunannya dan tidak menyalahi prinsip dan aturan yang berlaku, sehingga di dalam pelaporannya kepada masyarakat hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara benar.

Di dalam merumuskan konsep penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai acuan, yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2005. Acuan tersebut merupakan suatu alat bagi beberapa pihak yaitu: pihak pembuat laporan keuangan sebagai acuan untuk menyusun laporan keuangan, pihak pemeriksa sebagai acuan untuk memeriksa laporan keuangan apakah sesuai dengan standar yang berlaku, dan para pengguna laporan keuangan sebagai acuan di dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa peraturan yang memuat tentang ketentuan penyusunan SAP baru diundangkan pada tahun 2005, sehingga pelaksanaannya baru dapat dilaksanakan pada tahun 2006. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk mengamati dan melakukan penelitian untuk mengetahui apakah proses penyusunan laporan keuangan tersebut telah sesuai dilakukan dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan SAP komponen laporan keuangan pemerintah Indonesia terdiri dari empat bagian yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pada penelitian kali ini penulis akan mencoba untuk melakukan analisis atau pengamatan lebih mendalam terhadap salah satu komponen laporan keuangan tersebut, yaitu neraca.

Adapun alasan yang melatarbelakangi pemilihan neraca sebagai komponen laporan keuangan untuk diteliti karena neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pada suatu entitas, dan kali ini penulis akan melakukan penelitian neraca dengan mengambil data pada salah satu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang ada di Republik Indonesia.

1. 2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pendahuluan yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang ingin dibahas adalah:

- Dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, apakah penyusunan neraca pada Pemkab di Indonesia telah sesuai dengan SAP yang baru diterapkan pada tahun 2005?
- Penelitian kali ini ruang lingkup permasalahan yang diteliti oleh penulis akan dibatasi pada penelitian salah satu Pemkab saja, yaitu Pemkab Merauke.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah yang diberikan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengetahui apakah neraca yang dikeluarkan oleh Pemkab di Indonesia dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi telah disusun sesuai dengan SAP yang baru diundangkan atau belum.

1.4 METODOLOGI PENELITIAN

Di dalam menyelesaikan proses penelitian, penulis melakukan dua jenis penelitian, yaitu penelitian lapangan dan juga penelitian kepustakaan.

Dalam rangka proses penelitian lapangan penulis dibantu oleh Departemen Keuangan RI sebagai perantara untuk menghubungkan penulis dengan Pemkab Merauke. Kemudian setelah penulis berhasil menghubungi Pemkab Merauke, maka penulis diperkenalkan oleh Pemkab Merauke untuk memperoleh data yang terkait dengan penelitian, yaitu neraca Kabupaten Merauke dan bahan lain yang berhubungan dengan proses penyusunan neraca tersebut.

Meskipun penulis telah memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian, akan tetapi penulis tidak lepas dari ketidakpahaman mengenai data yang diperoleh, untuk mengatasi hal tersebut maka penulis melakukan wawancara dengan pihak Pemkab Merauke. Adapun wawancara dilakukan dengan cara menggunakan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan untuk dijawab oleh pemerintah kabupaten Merauke dan wawancara yang dilakukan secara verbal. Wawancara verbal dimaksud dilakukan oleh penulis melalui media komunikasi dan wawancara langsung ketika salah seorang pejabat Pemkab Merauke datang ke Jakarta.

Pada dasarnya penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh wawasan tentang konsep teoritis dan berbagai macam kebijakan pemerintah di dalam proses pembuatan laporan keuangan, dalam hal ini laporan keuangan instansi pemerintah. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian kepustakaan melalui pencarian berbagai macam sumber informasi yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan pemerintah. Informasi tersebut diperoleh melalui pencarian sumber undang-undang yang menjadi acuan di dalam proses penyusunan laporan keuangan, pencarian data-data yang berkaitan dengan proses penyusunan laporan keuangan, pencarian referensi penulisan yang dilakukan melalui buku dan media elektronik, dan terakhir adalah penelitian melalui pembelajaran teori yang telah di dapat selama duduk di bangku kuliah.

1. 5 METODE ANALISIS

Metode analisis yang digunakan di dalam proses penyusunan skripsi ini adalah metode analisis secara induktif, dimana penulis membandingkan komponen-komponen yang dilaporkan oleh Pemkab Merauke dengan peraturan yang berlaku, yaitu neraca yang disusun oleh Pemkab Merauke dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan hasil yang dibandingkan tersebut maka penulis melihat dan menarik kesimpulan apakah pemerintah kabupaten Merauke telah sesuai atau belum melaksanakan pembuatan laporan keuangan dengan ketentuan yang berlaku.

1. 6 MANFAAT PENELITIAN

Dengan dilakukannya penelitian ini maka penulis mengharapkan adanya manfaat yang diperoleh, yaitu:

1. Bagi Pemkab Merauke dan Pemerintah Pusat: dapat dijadikan masukan untuk pelaporan untuk periode berikutnya.
2. Bagi penulis: dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan juga untuk melihat langsung aplikasi teori yang selama ini di dapat ketika berada di bangku kuliah
3. Bagi pembaca: dapat digunakan sebagai bahan masukan dan juga acuan di dalam melakukan penelitian dengan objek yang berbeda dan juga untuk menambah pengetahuan pembaca terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah.

1. 7 SISTEMATIKA PENELITIAN

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

- Bab I: Pendahuluan. Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, metode analisis, dan sistematika pembahasan.
- Bab II: Landasan teori. Bab ini akan membahas teori-teori yang mendasari penulisan skripsi ini, yaitu teori yang berkaitan dengan penyusunan neraca Kabupaten Merauke.
- Bab III: Proses penyusunan neraca Pemkab di Indonesia. Bab ini akan membahas mengenai proses penyusunan neraca yang dilakukan oleh Pemkab, yaitu Pemkab Merauke dari awal penyusunan hingga penerbitan neraca tersebut.

- Bab IV: Analisa proses penyusunan neraca Pemkab. Bab ini akan menganalisa penyusunan neraca Kabupaten Merauke terkait dengan kesesuaiannya dengan SAP, kemudian penulis akan mencoba memberikan penyusunan yang benar, yang sesuai dengan SAP jika terdapat ketidaksesuaian penyusunan neraca dengan SAP.
- Bab V: Kesimpulan dan saran. Bab ini menyimpulkan penelitian yang telah dilakukan dan memberi saran kepada pihak pemerintah kabupaten Merauke sebagai bahan masukan.

